

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Tarif sesuai dengan Biaya Operasional Kendaraan setelah dilakukan analisis menurut segi operator, maka dapat ditentukan hasil analisis setelah perhitungan adalah:
 - a. Trayek Gending : Rp. 9.063
 - b. Trayek Semampir : Rp. 10.731
2. Tarif sesuai dengan hasil analisis perhitungan menurut Ability To Pay dan Willingness To Pay menghasilkan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan ATP/Kemampuan membayar:

 - a. Trayek Gending : Rp. 10.114
 - b. Trayek Semampir : Rp. 10.114

Berdasarkan WTP/Kemauan membayar:

 - a. Trayek Gending : Rp. 7.308
 - b. Trayek Semampir : Rp. 8.455
3. Usulan tarif perhitungan berdasarkan kondisi eksisting, BOK, ATP, dan WTP, maka rekomendasi tarif ini bisa dijadikan acuan dan usulan kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk membuat Surat Keputusan dan penetapan tarif yang tidak merugikan pihak manapun, baik dari segi regulator, operator, maupun pengguna jasa angkutan pedesaan. Dapat digunakan untuk hasil tarif Trayek Gending sebesar Rp. 10.114 sedangkan untuk Trayek Semampir sebesar Rp. 10.731 yang dimana tarif tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Biaya Operasional Kendaraan, *Ability To Pay*, dan *Willingness To Pay*. Hal tersebut dijadikan acuan standart tarif angkutan pedesaan supaya tidak merugikan berbagai pihak baik pemerintah, operator maupun pengguna jasa.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan:

1. Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu melakukan pembaharuan SK tarif terhadap angkutan pedesaan yang seimbang dari ketiga sisi yaitu operator, pengguna, dan regulator. Hal itu, bertujuan untuk pihak operator tidak memberikan tarif secara sepihak yang dapat merugikan pihak pengguna.
2. Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu melakukan pengawasan secara berkala supaya pihak operator tidak mengubah ketentuan tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pemerintah dapat memberikan subsidi yang bertujuan untuk membantu pengguna jasa transportasi berpenghasilan rendah untuk dapat menggunakan angkutan pedesaan.
4. Pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa meningkatkan kinerja pelayanan angkutan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, karena besaran tarif yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada pihak konsumen.